

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI
PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO**

HERU KURNIAWAN

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Metro. Kota Metro, Lampung, Indonesia**

Email : herukurniawan565@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah dengan melihat kemampuan keuangannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah di Kota Metro beserta tingkat kemandiriannya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Adapun alat analisisnya adalah DDF, DOF, Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah serta Rasio Kemandirian Daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari instansi pemerintah terkait, yakni mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu 2014-2019. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari tahun 2014-2019 pendapatan Kota Metro terus meningkat, tetapi peningkatan ini juga disertai dengan peningkatan jumlah belanja daerah (kecuali pada tahun 2015) sehingga pada akhirnya pada tahun 2019 terjadi defisit anggaran. Ini disebabkan karena prosentase peningkatan belanja lebih besar daripada prosentase peningkatan pendapatan daerah. Adapun jika dilihat dari hasil analisis kuantitatifnya, dapat disimpulkan bahwa Kota Metro belum mampu secara keuangan dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Ini terlihat dari masih rendahnya proporsi PAD terhadap TPD dari tahun 2014-2019, dengan rerata sebesar 15,56%. Perhitungan rasio kemandirian Kota Metro menunjukkan hasil rerata sebesar 20,52%. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kota Metro memiliki pola hubungan instruktif, dimana ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Metro masih sangat rendah (belum mandiri) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah Kota Metro lebih mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial, menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB meningkat.

Kata Kunci : Kemampuan Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, Transparansi Pemerintah Daerah.

**ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL ABILITIES IN IMPLEMENTATION
REGIONAL AUTONOMY TO IMPROVE TRANSPARENCY
METRO CITY GOVERNMENT**

HERU KURNIAWAN

**Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business,
Muhammadiyah Metro University. Metro City, Lampung, Indonesia**
Email : herukurniawan565@gmail.com

ABSTRACT

One measure of the success of regional autonomy is by looking at its financial capacity. Based on this, this study aims to determine the regional financial capacity in Metro City and its level of independence. The method of analysis used in this research is descriptive and quantitative analysis methods. The analytical tools are DDF, DOF, Fiscal Capacity, Fiscal Need, Effort / Fiscal Position, PAD Effectiveness Ratio, Regional Tax, and Retribution Performance Indicators and Regional Independence Ratio. The data used is secondary data from related government agencies, namely the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in the 2014-2019 period. The results of the descriptive analysis show that from 2014-2019 the revenue of Metro City continued to increase, but this increase was also accompanied by an increase in the amount of regional expenditure (except in 2015) so that in 2019 there was a budget deficit. This is because the percentage of increased spending is greater than the percentage increase in regional income. When viewed from the results of its quantitative analysis, it can be concluded that Metro City is not yet able to financially finance its own governmental activities in its region. This can be seen from the low proportion of Locally-generated revenue (PAD) to TPD from 2014-2019, with an average of 15.56%. The calculation of the independence ratio for Metro City shows an average result of 20.52%. This illustrates that Metro City has a pattern of instructive relationships, where financial dependence on the central government is still very high. Based on the research results, in general, it can be said that the regional financial capacity of Metro City is still very low (not yet independent) in the context of implementing regional autonomy. For this reason, it is hoped that the local government of Metro City will further optimize efforts to intensify and extend potential PAD sources, create attractiveness, and a conducive climate for local and foreign investors to invest so that the rate of regional economic growth and Gross Regional Domestic Product (GRDP increases).

Keywords: *Regional Financial Capability, Regional Autonomy, Transparency of Regional Government.*